

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Feminisme Postkolonial

Feminisme berasal dari bahasa Prancis *feminsm* yang berarti “kewanitaan” atau hal-hal yang berkaitan dengan perempuan. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, istilah ini berkembang menjadi sebuah gerakan dan ideologi yang fokus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Feminisme ini muncul karena realitas sosial yang cenderung mengutamakan laki-laki, sementara perempuan seringkali terpinggirkan. Gerakan ini hadir untuk melawan ketidakadilan tersebut, termasuk dengan menolak stereotip gender dan mendorong kesetaraan dalam pendidikan, pekerjaan, hingga kehidupan sosial. Gerakan feminisme ini dimulai sejak akhir abad ke-18 dan berkembang ke abad 20 yang dimulai dengan penyuaran persamaan atas hak politik untuk perempuan.<sup>10</sup>

Secara sejarah, feminisme ini mulai berkembang di Eropa pada masa Pencerahan, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Lady Mary Wortley Montagu dan Marquis de Condorcet. Dari sini, lahir teori-teori feminis yang membahas ketimpangan gender berdasarkan pengalaman

---

<sup>10</sup> Salamah, *Teori Sastra* (Sumatera Barat: CV. AZKA PUSTAKA, 2024), hlm. 86,90.

dan peran sosial perempuan. Teori-teori ini berkembang di berbagai bidang ilmu untuk menjawab isu-isu ketidakadilan gender. Meskipun demikian, feminisme juga tidak lepas dari kritik karena beberapa bentuk feminisme dianggap terlalu fokus pada perempuan kulit putih dari kelas menengah dan berpendidikan tinggi, sehingga kurang mewakili kelompok perempuan yang lebih beragam.<sup>11</sup>

Organisasi ilmiah pertama yang fokus pada perempuan didirikan di Middelburg, sebuah kota di selatan Belanda, pada tahun 1785. Menjelang abad ke-19, feminisme mulai berkembang sebagai sebuah gerakan yang mulai menarik perhatian, terutama di kalangan perempuan kulit putih Eropa. Dalam proses penyebarannya, feminisme mengalami banyak perkembangan hingga melahirkan berbagai istilah dan aliran, seperti gerakan gelombang pertama dikenal sebagai feminisme liberal yang berkembang pada abad ke-19, sedangkan gelombang kedua muncul pada sekitar tahun 1960. Gelombang ketiga kemudian hadir dengan feminisme postmodern atau feminisme Perancis, yang juga berkembang bersamaan dengan feminisme postkolonial.<sup>12</sup>

Dalam konteks budaya, pemikiran postkolonial ini termasuk hal yang baru. Seperti halnya teori postmodern yang berasal dari dunia sastra, pemikiran postkolonial juga berkembang dari sana. Istilah

---

<sup>11</sup> Salamah, hlm. 88-89.

<sup>12</sup> Salamah, hlm. 87-90.

“postkolonial” awalnya bukan berarti masa setelah penjajahan selesai, tetapi lebih sebagai bentuk perlawanan terhadap kekuasaan penjajah dan dampaknya yang masih terasa sampai sekarang. Dalam budaya, jika satu kelompok menguasai atau menindas kelompok lain, itu disebut sebagai bentuk penjajahan. Maka dari itu, pemikiran postkolonial muncul untuk membahas bagaimana Barat (negara penjajah) menguasai Timur (negara jajahan). Anggapan bahwa Barat merupakan pusat kekuasaan dunia yang dibuat untuk melemahkan negara Timur. Pemikiran postkolonial membuka ruang diskusi kritis terhadap warisan kolonialisme yang masih mempengaruhi struktur sosial dan budaya saat ini. Postkolonial membantu kita sadar bahwa warisan penjajahan masih mempengaruhi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di negara bekas jajahan. Jadi, postkolonial adalah bentuk kritik terhadap budaya dan cara berpikir zaman sekarang yang masih dipengaruhi penjajahan. Tujuannya adalah untuk menghapus jejak penjajahan yang masih tersisa dalam globalisasi dan budaya modern. Studi postkolonial ini membahas tentang penjajahan, penguasaan, perbudakan, dan penindasan. Salah satu bentuk penjajahan yang masih ada sekarang adalah budaya patriarki, seperti laki-laki lebih tinggi dari perempuan dalam masyarakat adat. Meskipun banyak negara sudah merdeka sejak 1980-an, bekas penjajahan ini masih terasa.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan perempuan dalam tradisi kawin Anom: subaltern*

Istilah postkolonial ini muncul pada abad ke-19, dan semakin berkembang dengan munculnya pemikiran dari tokoh poststruktural seperti Derrida dan Foucault. Mereka berpendapat bahwa kebenaran tidak hanya satu dan tidak bisa berlaku untuk semua orang. Dari pemikiran mereka ini, lahirlah tokoh-tokoh postkolonial seperti Edwar Said, Homi K. Bhaba, Gyan Prakash, Bill Aschroft, Antonio Gramsci, Fanon Frantz, Ania Loomba, Leela Gandhi, Chandra Talpade Mohanty, dan Gayatri Chakravorty Spivak. Mereka berusaha membongkar pengaruh kolonialisme yang masih ada sampai sekarang. Spivak menyoroti kelompok tertindas (subaltern), terutama perempuan di negara jajahan yang suaranya tidak terdengar. Mohanty menekankan pentingnya membangun solidaritas perempuan di seluruh dunia, dan mengkritik feminisme Barat yang kurang memahami pengalaman perempuan di negara berkembang.<sup>14</sup>

## **B. Pemikiran Chandra Talpade Mohanty**

Chandra Talpade Mohanty lahir pada tahun 1955, di Mumbai, India. Ia dibesarkan di India dan pernah tinggal di Nigeria serta London. Chandra Talpade Mohanty adalah seorang teoritikus feminis postkolonial dan transnasional. Sampai pada tahun 2013, ia menjabat sebagai Ketua

---

*perempuan pada suku Banjar dalam perspektif poskolonial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 41-43.

<sup>14</sup> Nasution, hlm. 44,50.

Departemen Studi Perempuan serta Profesor Studi Perempuan dan Gender, Sosiologi, dan Landasan Budaya Pendidikan, sekaligus Profesor Dekan Humaniora di Universitas Syracuse.

Mohanty meraih gelar sarjana dan pada tahun 2005 menjadi warga negara Amerika Serikat. Pada tahun 1974, Mohanty lulus dengan pujian dan meraih gelar Sarjana dalam Bahasa Inggris dari Universitas Delhi, India. Setelah itu, Mohanty melanjutkan pendidikan dan memperoleh gelar Magister dalam Bahasa Inggris pada tahun 1976. Ia kemudian melanjutkan studi di Universitas Illinois di Urbana-Champaign, tempat ia memperoleh gelar Magister dalam Pendidikan dengan fokus pada pengajaran Bahasa Inggris, pada tahun 1980. Ia melanjutkan pendidikannya di universitas yang sama dan meraih gelar Doktor dalam bidang Pendidikan pada tahun 1987. Mohanty juga menerima gelar Doktor Kehormatan dalam bidang Humaniora dari College of Wooster, Ohio, pada tahun 2012.<sup>15</sup>

Dalam salah satu esainya, Mohanty mengkritik proyek politik feminisme Barat yang cenderung memandang perempuan Dunia Ketiga sebagai kelompok homogen. Ia menyoroti bahwa feminisme Barat sering mengabaikan perbedaan pengalaman perempuan di negara-negara Selatan, yang dipengaruhi oleh konteks geografi, sejarah, dan budaya.

---

<sup>15</sup> Chizu Sato, "Chandra Talpade Mohanty," *Elgar Encyclopedia of Development*, 2023, 78–83, <https://doi.org/10.4337/9781800372122.ch18>.

Esai ini menjadi karya penting yang mengangkat tantangan feminis Dunia Ketiga dalam memperoleh ruang di dalam gerakan feminis global, dan mendorong perubahan dalam hubungan kekuasaan antara feminis dari Dunia Pertama dan Ketiga.

Pada tahun 2003, Mohanty menerbitkan buku *Feminisme Tanpa Batas: Teori Dekolonisasi, Mempraktikkan Solidaritas*. Dalam buku ini, ia menekankan pentingnya menghubungkan teori dan praktik, serta membangun solidaritas antarperempuan lintas negara. Di bagian akhir, dalam bab *Reorienting Feminism*, ia memuat ulang esai “*Under Western Eyes*” dan menanggapi kritik-kritik yang muncul, sambil menegaskan bahwa kerja sama antara feminisme Dunia Ketiga dan Barat sangat penting dan perlu diwujudkan.<sup>16</sup>

Chandra Talpade Mohanty dalam esainya yaitu *Under Western Eyes: Feminist Scholarship and Colonial Discourses*, mengkritik pandangan feminisme Barat yang sering menyamaratakan perempuan di negara-negara Dunia Ketiga sebagai kelompok yang homogen dan mengalami penindasan yang sama. Ia menegaskan bahwa kenyataannya, perempuan-perempuan ini sangat beragam, baik dari segi budaya, sosial, maupun sejarah, sehingga menganggap mereka semua memiliki pengalaman yang sama justru membuat gambaran tentang keadaan

---

<sup>16</sup> Sato, hlm. 78-83.

mereka menjadi kurang tepat. Mohanty juga menunjukkan bahwa feminisme Barat seringkali menggambarkan perempuan Dunia Ketiga sebagai korban pasif yang memerlukan penyelamatan, sehingga menghilangkan suara dan peran aktif perempuan dalam menentukan nasibnya sendiri.

Cara pandang ini menyederhanakan hubungan dan situasi yang sebenarnya rumit di dalam masyarakat mereka. Mohanty mengkritik cara penelitian feminis Barat yang memakai pendekatan sama untuk semua tanpa melihat kondisi lokal yang berbeda-beda. Ia menjelaskan bahwa apa yang dianggap penindasan di satu budaya bisa memiliki makna lain yang berbeda di budaya lain. Jadi, penting untuk melihat konteksnya agar hasil penelitian tidak salah. Untuk melawan cara pandang Barat yang dominan, Mohanty mengatakan bahwa perlu untuk membuka ruang agar perempuan Dunia Ketiga dapat menceritakan pengalaman mereka sendiri.

Dengan demikian, teori feminis dapat lebih lengkap dan cocok untuk kondisi perempuan di berbagai tempat. Mohanty juga menekankan bahwa pentingnya membangun persatuan feminis yang menghargai perbedaan dan kondisi lokal. Jika kurang peka dengan perbedaan budaya, persatuan ini dapat menghilangkan identitas dan perjuangan perempuan yang unik. Oleh karena itu, kita harus memahami

adat, nilai, dan kondisi sosial agar perjuangan yang dibuat benar-benar berarti dan berhasil.<sup>17</sup>

### C. Perempuan dalam Konteks Kolonial

Dalam ranah kolonial, perempuan seringkali diposisikan sebagai kelompok yang tertindas. Mereka mengalami kekerasan fisik, dilecehkan, dimarginalkan, dan ditempatkan sebagai subjek *subaltern*, yaitu kelompok yang tidak memiliki kuasa untuk menyuarakan diri dalam sistem sosial yang didominasi oleh kekuatan kolonial dan patriarkal. Permajinalan perempuan ini tidak hanya terjadi dalam relasi dengan penjajah, tetapi juga oleh masyarakat pribumi sendiri. Hal ini memperkuat pola pikir yang menganggap bahwa perempuan adalah sosok lemah dan tidak layak terlibat dalam ruang-ruang kekuasaan.<sup>18</sup>

Secara historis, kolonialisme di Indonesia dimulai sejak kedatangan VOC pada tahun 1602, yang kemudian melahirkan dominasi politik dan ekonomi oleh Belanda. Masa kolonial tidak hanya ditandai oleh penindasan terhadap rakyat secara umum, tetapi juga diskriminasi terhadap perempuan. Diskriminasi ini merupakan salah satu ciri melekat dalam sistem kolonial. Laki-laki kulit putih memiliki kebebasan untuk memperistri atau menjadikan perempuan pribumi sebagai gundik tanpa

---

<sup>17</sup> Mohanty, *Feminism Without Borders: Decolonizing Theory, Practicing Solidarity*, hlm. 17-42.

<sup>18</sup> Sarnil dan Burhan, "Perempuan pada Latar Kolonialisme dalam Novel Sang Maharani karya Agnes Jessica Tinjauan Feminisme Poskolonial," *Cakrawala 2*, no. 1 (2019): 35-49.

ikatan resmi, sementara hal sebaliknya tidak pernah terjadi. Perempuan pada masa itu mengalami penindasan secara budaya. Meskipun terdapat upaya dari perempuan untuk bangkit, mereka tetap berada di posisi yang terpinggirkan. Perjuangan mereka untuk memperoleh status yang setara sering kali gagal karena dikendalikan oleh pihak yang memiliki kuasa dan pengaruh. Seperti yang dijelaskan oleh Antonio Gramsci, hegemoni membuat suara kelompok yang lemah sulit terdengar. Akibatnya, perempuan kehilangan hak untuk menyuarakan pikiran dan pendapatnya. Bahkan muncul pandangan bahwa perempuan harus menerima posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki yang dianggap superior. Selama masa penjajahan, perempuan sangat dibatasi ruang geraknya. Mereka tidak memiliki kebebasan berbicara, tidak bisa mengekspresikan pendapat, keluar rumah, atau mengakses pendidikan. Perempuan mengalami penindasan ganda: pertama karena mereka adalah perempuan, dan kedua karena mereka adalah bagian dari bangsa yang dijajah.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Nasution, hlm. 33-35.